

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep formal dan informal menurut Stone (1989) dalam mendiskusikan rezim bermakna bahwa adanya hubungan antara institusi formal dan informal di mana penekanan pentingnya adalah dalam upaya melihat ilustrasi atau kelompok informal yang relatif stabil dengan akses terhadap sumber daya kelembagaan, sehingga memungkinkan institusi informal akan memiliki peran berkelanjutan dalam mempengaruhi pengelolaan urusan-urusan publik. Suatu keputusan pemerintah dan aturan yang berlaku didalam Lembaga formal dilindungi oleh badan negara, dan pelanggaran yang terjadi atas aturan tersebut berdampak pada munculnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga formal, atau bahkan oleh negara. Politik informal merupakan cara Lembaga memperoleh kekuasaan dan hak istimewa dengan cara menggunakan hubungan pribadi, politik informal dilakukan diluar dari prosedur yang ditetapkan dari Lembaga legislatif. Politik informal mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan praktik yang tidak tertulis atau tidak resmi, namun tetap berperan dalam mempengaruhi cara kekuasaan dan keputusan diambil dalam suatu kelompok, organisasi, atau negara. Politik informal mencakup berbagai macam praktik dan aktor informal yang memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Praktik-praktik ini dapat melibatkan pendekatan personal, komunikasi, dan praktik-praktik budaya, dan

dapat digunakan untuk memajukan kepentingan berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, dan partai politik untuk membahas permasalahan yang terjadi

Menurut K. Aarts (dalam Clark, 2003), *political linkage* dipahami sebagai suatu ikatan antara warga negara, organisasi sosial, dan sistem politik. Political linkage dipahami bahwa pemerintah hanya membutuhkan responsive terhadap opini yang ada dipublik. Political linkage diartikan sebagai media yang dimana pemimpin politik bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari publik dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi representasi partai politik menyediakan beberapa jenis linkage, Clark menyebutkan ada tujuh jenis political linkage yang disediakan oleh partai politik yaitu: Linkage partisipatoris, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam politik. Linkage Electoral, yakni ketika pemimpin partai mampu mengontrol beragam elemen dari proses elektoral. *Policy responsive linkage*, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi untuk meyakinkan bahwa pemerintahannya responsif terhadap rakyat/pemilih. Linkage klientistik, yakni ketika partai bertindak sebagai chanel dalam pertukaran suara yang diberikan oleh pemilih. *Linkage directive*, linkage ini digunakan oleh mereka yang berada dalam public office untuk mengontrol perilaku warga. Linkage organisasional, yakni linkage yang didasarkan pada pertukaran antara elit partai dan elit organisasi yang terbukti mampu memobilisasi atau menarik dukungan organisasinya kepada partai politik. Linkage representative, yakni merujuk pada hubungan atau keterkaitan

yang terjalin antara legislatif, seperti anggota DPRD, dengan masyarakat. Dalam hal ini, keterkaitan tersebut tidak hanya mencakup peran formal legislatif, tetapi juga melibatkan dimensi sosio-kultural serta interaksi informal yang berlangsung di luar tugas resmi mereka.

Dilihat dari perspektif kajian partai politik menurut Kitschelt, *political linkage* sebagai pola hubungan antara seorang politisi dengan warga negaranya sebagai konstituennya. Ia mengidentifikasi tiga jenis *linkage* yaitu antara lain: *Linkage* Klientelistik merupakan salah satu jenis 'pertukaran' antara konstituen elektoral dengan politisi sebagai agen dalam iklim demokratik. Sehingga, *linkage* klientelistik merupakan pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan warga yang diwakilinya melalui cara pemberian keuntungan material agar warga yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan terhadapnya. Pola relasi keduanya kemudian menjadi patron (politisi) klien (warga negara). Kedua *Linkage* Programatik, terbentuk karena seorang politisi membangun pola relasi dengan konstituen berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Ketiga *Linkage* Karismatik memiliki pola relasi antara politisi dengan konstituennya yang dibangun berdasarkan pada karisma personal politisi yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa *political linkage* (tautan politik) saling terkait dengan organisasi secara kelembagaan memiliki fungsi dalam menjakankan suatu kepentingan yang sifatnya politis seperti partai politik maupun Lembaga lainnya yang berkaitan dengan fungsi

politik. Dalam teori dasar demokrasi, adanya *political linkage* dipahami sebagai tautan antara partai politik dengan para pemilihnya, kemudian antara parlemen dengan para pemilihnya.

Keterhubungan politik atau *political linkage* di Kota Semarang memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi dengan menjalin komunikasi antara masyarakat dan aktor-aktor politik, seperti partai politik, legislator, serta pemerintah daerah. Melalui mekanisme ini, aspirasi serta kebutuhan warga dapat tersampaikan secara lebih efektif, baik melalui diskusi publik, pertemuan langsung, maupun platform digital yang tersedia. Selain itu, keterhubungan politik berfungsi untuk memperkuat keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih selaras dengan kondisi serta permasalahan nyata di lapangan. Keberadaannya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai proses politik, seperti pemilu, musyawarah pembangunan, serta perumusan kebijakan publik, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Selain meningkatkan partisipasi, *political linkage* juga berperan dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya keterhubungan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja wakil rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi publik. Lebih jauh, hubungan yang baik antara masyarakat dan pemangku kebijakan juga berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Kota Semarang, karena tumbuhnya kepercayaan serta keterlibatan aktif

warga dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberlanjutan keterhubungan politik yang kuat menjadi aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan demokratis, sekaligus membangun hubungan yang harmonis serta berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah.

Pendekatan sosio-kultural merupakan salah satu faktor penting yang perlu diterapkan oleh legislator dalam menjalankan tugasnya, karena membantu mereka memahami secara lebih mendalam kondisi sosial dan budaya masyarakat yang diwakilinya. Dengan pendekatan ini, legislator dapat mempererat hubungan dengan masyarakat, memahami nilai-nilai yang dijunjung, serta merancang kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan warga. Legislator yang mengadopsi pendekatan sosio-kultural tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mudah diterima dan diterapkan di masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan legislator untuk lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat melalui interaksi langsung, keterlibatan aktif, dan dialog terbuka dengan berbagai kelompok sosial. Dengan memahami berbagai persoalan dari sudut pandang sosio-kultural, legislator dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, adil, serta sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dengan

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan pendekatan sosio-kultural dalam proses legislasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap kehidupan sosial dan budaya memungkinkan legislator menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Indonesia memiliki lembaga negara yang dibagi menjadi tiga yaitu Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yakni DPR, DPD, MPR. Lembaga Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hak dan tugas yang dimiliki oleh DPR merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi sebagai pelaksanaan dalam menjalankan fungsi DPR, tugas yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mengawasi pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan menunjukkan untuk kepentingan rakyat. Selain itu DPR memiliki 3 bidang utama yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Tujuan dibentuknya Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu berfungsi sebagai bagian fundamental sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk menjaga prinsip demokrasi, serta menjalankan fungsi perwakilan dengan cara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat memiliki harapan yang besar pada efektivitas DPR RI dalam mewujudkan amanat demokrasi di Indonesia. Namun jangkauan DPR RI untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat Indonesia kurang efektif dan tidak berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, maka dari itu terbentuklah DPRD Provinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten. Dengan demikian, DPRD Kota atau Kabupaten bertindak sebagai wakil rakyat yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran daerah, serta menjaga kepentingan rakyat yang diwakilinya terkhusus di kota atau kabupaten tersebut.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 juga berlaku pada DPRD Kota Semarang. Berdasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kota Semarang. Dalam pasal 9 ayat 1 jumlah anggota DPRD berjumlah 50 orang dari partai politik berbeda, yang menduduki adalah Fraksi PDIP berjumlah 19 anggota, Fraksi Gerindra 6 anggota, Fraksi Demokrat 6 anggota, Fraksi PKS 6 anggota, Fraksi Golkar dan Nasdem 6 anggota, Fraksi PKB 4 anggota, serta Fraksi

PAN dan PSI 4 anggota. Keanggotaan DPRD disahkan dengan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan laporan KPUD Kota Semarang yang disampaikan melalui Walikota. Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting untuk menjaga prinsip demokrasi yang kuat dan memudahkan lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Anggota DPRD memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang ditentukan KPU dan penempatannya ditentukan oleh partai politik, Kota Semarang memiliki 6 dapil yang meliputi Dapil 1 Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Dapil 2 Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Dapil 3 Tembalang, Candisari, Dampil 4 Gajahmungkur, Banyumanik, Gunungpati, Dapil 5 Mijen, Ngaliyan, Tugu, Dapil 6 Semarang Barat, Semarang Selatan. DPRD Kota Semarang memiliki 3 komisi yang tugas dan cara kerjanya berbeda, seperti Komisi A yang bermitra dengan Pertahanan Hukum berkaitan dengan Camat, Lurah, dan Pemerintahan, Komisi B membahas mengenai budgeting anggaran pendapatan daerah yang bermitra dengan Dinas Penghasil, Bapenda, Komisi C pertanggung jawab mengenai infrastruktur pembangunan meliputi jalan dan jembatan, Komisi D melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Seorang anggota DPRD memiliki kewajiban untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah, mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadinya. Komitmen seorang politikus bukan semata-mata

hanya untuk uang, keuntungan dan kesenangan, tetapi karena ingin menjalankan tugasnya, dan menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Jika diamati dari cara berinteraksi anggota dewan dengan masyarakat, mereka memiliki cara masing-masing untuk membangun citra sebagai seorang anggota dewan. Pada zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, anggota dewan banyak yang menggunakan sosial media yang berisi konten vlog, supaya lebih dikenal oleh banyak masyarakat, namun dengan begitu tidak cukup membuat masyarakat percaya akan apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebagai anggota dewan mereka harus turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, cara yang digunakan biasanya melakukan pertemuan dengan masyarakat diluar dari jam kerja mereka, seperti mengadakan sesi diskusi dirumah untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat, bisa juga dengan cara mereka mendapatkan undangan acara seperti wayangan dari suatu daerah dengan seperti itu akan membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan anggota dewan tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota dewan dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat, dengan begitu kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Dengan cara melakukan pendekatan dan bersosialisasi dengan masyarakat, anggota dewan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari banyak warga, namun sebagai anggota dewan juga harus menerima jika mendapatkan kritik dari masyarakat serta harus menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, lalu dibahas pada saat rapat dengan sesama anggota dewan. Hal itu sangat efektif dan efisien digunakan, selain itu tidak menyulitkan

bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan tentang aspal jalan, lampu jalan, dan lain sebagainya, namun masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai dengan dapil dewan tersebut.

Berdasarkan penggambaran terhadap beberapa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel dan bermula pada permasalahan yang terjadi pada Anggota DPRD Kota Semarang dalam menjalankan tugas sebagai seorang legislator diluar dari jam kerja yang dimiliki, dengan cara melakukan pertemuan dengan masyarakat yang diadakan dirumah anggota dewan atau dengan cara memenuhi undangan-undangan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini rencananya akan menyatukan antara masyarakat dengan Anggota DPRD Kota Semarang untuk meyakinkan masyarakat Kota Semarang bahwa dapat dengan mudah dalam melakukan penyampaian aspirasi yang dimiliki masyarakat, namun penyampaian aspirasi yang lebih efektif dilakukan dengan cara menyesuaikan daerah pemilihan anggota dewan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penggambaran dari latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, sehingga dalam “Politik Legislator Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang” dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana legislator DPRD Kota Semarang membangun *political linkage* di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: Berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengulas, dan menganalisis perilaku legislator dalam *political linkage*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca terkait dengan “Politik Legislator Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang”. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber pengembang ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam melihat cara Anggota DPRD Kota Semarang bekerja di luar tugas resmi.
- b. Bagi Anggota DPRD Kota Semarang, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tinjauan berikutnya dalam melakukan tugas sebagai wakil rakyat.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran Anggota DPRD Kota Semarang di luar tugas resmi mereka, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk melakukan penyusunan penelitian. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah dalam penyusunan kerangka pikiran demi mendapatkan gambaran penelitian. Sehingga penelitian ini bisa menjelaskan mengenai Politik Legislator Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh David Efendi dan Agam Primadi, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2016 dalam artikel yang berjudul politik informal dalam pemilu pada 2015 di Bangka Selatan Indonesia. Titik permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah aktor informal lokal dalam kasus ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teoritis mengenai negara pasca-otoriter dan demokrasi transisi di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya proses informal dan model patronase. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini, yaitu pola jejaring aktor lokal berdasarkan relasi pendukung kandidat, relasi dibangun secara sengaja yang digalangi langsung oleh kandidat dengan para ulama kampung yang dipercaya bisa

memobilisasi masa. Selain itu berdasarkan politik dua kaki, dalam proses demokrasi, sudah menjadi hal yang lumrah ketika aktor aktor lokal dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara spontanitas menyatakan sikap untuk mendukung salah satu kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi eksekutif Bupati. Praktek demikian ini di dalam ilmu politik dikenal dengan istilah dengan klientelism.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Regina Singestecia, Eko Handoyo, dan Noorocmat Isdaryanto, dalam jurnal yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. Meninjau partisipasi masyarakat Tionghoa yang bersifat sukarela dalam melakukan pemilihan atas kesadarannya sendiri sebagai wujud warga Negara yang baik untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data secara primer melalui wawancara dan skunder melalui pengimpulan dokumen. Hasil dari temuan ini adalah bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi wetan yaitu partisipasi politik konvensional, hal ini sesuai dengan pendapat Almond dalam Suryadi (2007:133) yang menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari konvensional dan non konvensional yang dimana kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik normal dalam demokrasi modern, sedangkan bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang illegal penuh kekerasan dan revolusioner.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fauziah Nasution, Meiliza Sartika, M. Farhan Dwiky Nanda, Adinda Dea Nazhira (2023) “keragaman sosio kultural

masyarakat” dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami sosiokultural lebih dalam, penelitian ini menjelaskan tentang konsep yang berkaitan tentang sosiokultural yakni identitas budaya, pluralisme, multikulturalisme serta ingin melihat keragaman sosiokultural yang ada pada interaksi antara budaya. Hasil penelitian ini adalah konsep-konsep seperti identitas budaya, pluralisme, dan multikulturalisme memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat global yang semakin terhubung dan saling bergantung, pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman sosiokultural menjadi faktor krusial dalam mempromosikan harmoni, dialog, dan kesetaraan di antara individu dan kelompok. Keragaman sosiokultural merujuk pada beragam latar belakang sosial, budaya, agama, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keragaman sosiokultural, dan mengkaji dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Politik Informal

Kata sifat 'informal' telah dilekatkan pada sejumlah besar istilah daftar sepintas termasuk referensi untuk politik, pengaturan, jaringan, lembaga, organisasi, norma, aturan, kegiatan atau pengaruh yang menjadikan semuanya memiliki kapasitas untuk menjadi informal. Almond dan Coleman membedakan struktur politik atas infrastruktur yang terdiri atas struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat dan suprastruktur politik yang terdiri atas

sektor pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan. Salah satu fungsi struktur lembaga menurut Gabriel yaitu Rule Making (membuat undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga (Badan Legislatif) yang meliputi DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, dan DPD. Politik informal adalah sejenis 'konvensi dan kode perilaku' dalam ranah politik, seperti jaringan kronisme dan guanxi. Kedua jenis politik tersebut saling berinteraksi dan secara fungsional tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem politik.

Argumennya bahwa politik informal adalah proses nyata dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan peran politik informal dalam bentuk praktik-praktik partikularisme atau informalitas berperan dalam mendorong kemampuan para incumbent (pejabat) untuk tetap bertahan dalam pemilu. Berdasarkan jenisnya mesin politik terbagi menjadi dua yaitu mesin politik informal (infrastruktur politik) dan mesin politik formal (suprastruktur politik), jika membahas mengenai infrastruktur politik (mesin politik informal) kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik. Infrastruktur politik (mesin informal) memiliki beberapa pengelompokan yang terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, media komunikasi politik, kelompok penekan, kelompok mahasiswa, kelompok wartawan, dan tokoh politik. Saluran informal yang digunakan pemilih untuk berhubungan dengan politisi membentuk kapasitas untuk meminta pertanggung jawaban dari para pemegang kekuasaan. Ketika jaringan politik informal

terfragmentasi dan tidak ditandai dengan adanya perbedaan status, para pemilih akan menghadapi resiko yang lebih kecil untuk memihak oposisi.

Politik informal merujuk pada proses atau aktivitas politik yang tidak diatur oleh aturan atau struktur formal dalam suatu sistem politik. Ini mencakup praktik-praktik, norma-norma, dan hubungan-hubungan politik yang tidak diakui secara resmi atau tercatat dalam hukum atau konstitusi. Politik informal dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan, pengambilan keputusan, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Beberapa contoh politik informal melibatkan:

1. Jejaring Politik

Hubungan pribadi atau kelompok yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

2. Pertemuan Informal

Pembicaraan atau pertemuan di luar struktur formal, seperti pertemuan informal antara pemimpin politik.

3. Negosiasi Tidak Resmi

Perundingan atau kesepakatan yang tidak diatur oleh perjanjian formal atau prosedur resmi.

4. Budaya Organisasi

Norma-norma dan nilai-nilai tidak tertulis di dalam suatu organisasi yang memengaruhi keputusan dan interaksi antar anggota organisasi.

Politik informal bisa memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan politik dan sosial, dan seringkali dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks.

1.6.2 Politik Informal: Pendekatan Sosio Kultural

Teori sosio kultural berasal dari kajian sosiologi dan antropologi namun digunakan juga sebagai perspektif atau sudut pandang dalam kajian lain seperti psikolog dan Pendidikan untuk menjelaskan proses belajar dalam konteks sosial. Ranjabar (2006:9) mengatakan bahwa Sosio kultural mengandung makna sosial dan budaya, kata sosial disini memiliki arti sebagai masyarakat atau kemasyarakatan, dimana masyarakat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari sekelompok orang yang didalamnya tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara menghadapinya. Pendekatan sosio kultural dapat dihubungkan dengan politik melalui pemahaman mengenai bagaimana budaya, norma, nilai, dan interaksi sosial mempengaruhi proses politik. Sosio kultural memainkan peran dalam pembentukan identitas politik individu dan kelompok. Nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol budaya dapat membentuk pandangan politik dan identitas kelompok politiknya. Menurut teori sosio kultural Pierre Bourdieu yang mengangkat konsep utama modal budaya dan modal sosial dimana Bourdieu memperkenalkan konsep budaya (pengetahuan, keterampilan) dan modal sosial (hubungan, jaringan) yang memengaruhi posisi sosial seseorang.

Menurut Sumner (1906) mengembangkan teorinya pada kelompok sosial yang lebih besar, dari kelompok tetangga menuju ke kelompok etnik dan kelompok partai politik. Teori ini berlanjut dalam perspektif sosio kultural modern yang melihat bahwa prasangka seseorang, prefensi dan persuasi politik yang disebabkan karena beberapa faktor seperti nasionalitas dan kelas sosial. Teori sosiokultural fokus pada pentingnya norma sosial (*social norms*) atau aturan tentang perilaku yang sesuai. Perspektif ini berpusat pada konsep budaya (*culture*), di mana kita dapat mendefinisikan secara lebih luas sebagai keyakinan (*belief*), adat (*customs*), kebiasaan (*habits*) dan bahasa yang dikembangkan secara bersama-sama oleh orang-orang dalam waktu dan tempat tertentu. Kelemahan dari teori sosio-kultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses- proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah.

Pendekatan sosio-kultural merujuk pada cara pendekatan atau analisis terhadap fenomena sosial atau budaya dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor sosial dan faktor budaya. Pendekatan ini mengakui bahwa budaya dan masyarakat saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Pendekatan sosio-kultural seringkali digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan. Pendekatan sosio-kultural sering digunakan untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan budaya, serta memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya mereka. Pendekatan ini telah membentuk dasar pemahaman di banyak bidang, terutama dalam melihat isu-isu yang

berkaitan dengan identitas, sosialisasi, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pendekatan sosio-kultural:

1. Konteks Budaya

Menekankan pentingnya memahami konteks budaya dalam menganalisis perilaku, norma, dan nilai-nilai sosial. Budaya dianggap sebagai kerangka referensi yang memberikan makna dan interpretasi terhadap pengalaman individu.

2. Interaksi dan Konstruksi Sosial

Memandang individu sebagai makhluk sosial yang terlibat dalam interaksi sosial dan pembangunan sosial bersama.

3. Pengaruh Budaya pada Perilaku

Meneliti cara budaya mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, termasuk norma, nilai, ritual, dan simbol-simbol budaya yang membentuk cara orang berpikir dan bertindak.

4. Sosialisasi

Menyoroti peran sosialisasi dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini membentuk identitas individu dan kelompok.

5. Analisis Dalam Konteks Makro dan Mikro

Memeriksa fenomena budaya baik dalam skala makro (misalnya, struktur sosial) maupun mikro (misalnya, interaksi antarindividu) untuk memahami kompleksitas dan kedalaman perubahan budaya.

1.6.3 *Political Linkage*

Menurut Brian J. Bow, *political linkage* adalah upaya-upaya untuk memecahkan kebuntuan atau meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) seseorang atau kelompok pada masalah tertentu dengan mengikatnya pada yang lain, tidak hanya sebatas isu. Keterkaitan disini dapat diartikan sebagai sifat kooperatif atau koersif, dan bisa juga demikian *prospective* (janji, ancaman) atau *retrospective* (penghargaan, pembalasan). Dalam konteks demokrasi representasional, tautan politik tidak hanya terbatas pada partai politik. Partai politik berusaha menjadi aktor yang memprovokasi terjadinya keterkaitan, namun tidak sepenuhnya berhasil, sehingga ruang kosong yang ditinggalkan oleh partai politik mulai diisi oleh aktor-aktor lain seperti kelompok kepentingan atau kelompok penekan (Lawson & Merkl, 1988). Tautan politik dapat diartikan sebagai hubungan antara pemimpin dengan konstituennya, aktor perantara, dan masyarakat sipil. Para pemimpin politik dapat menggunakan beberapa instrumen untuk membangun keterkaitan dengan berbagai aktor, misalnya fasilitas yang telah dibangun oleh organisasi perantara untuk mengumpulkan dan merepresentasikan opini publik dalam pemerintahan. Namun, aktor perantara seperti partai politik tidak dapat menjadi satu-satunya aktor yang menyediakan hubungan; terkadang politisi perlu membangun hubungan politik mereka sendiri. Kajian mengenai keterkaitan politik menjadi penting karena pada kenyataannya terdapat beberapa kesulitan dalam menjalin hubungan politik dengan berbagai aktor.

political linkage merujuk pada hubungan antara berbagai elemen dalam konteks politik, seperti hubungan antara partai politik dan pemilih, parlemen, masyarakat sipil, dan lembaga politik lainnya. Tautan politik juga mencakup hubungan antara kebijakan politik dan perilaku politik. Beberapa teori dan penelitian terkait tautan politik menyoroti pentingnya hubungan antara berbagai entitas politik dan bagaimana hubungan ini memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan. Beberapa sumber yang ditemukan membahas tautan politik dalam konteks Indonesia, seperti hubungan antara partai politik dan masyarakat sipil, parlemen, dan lembaga politik lainnya. Dari sumber-sumber yang ada, terdapat beragam pendekatan dan konsep terkait tautan politik, yang mencakup hubungan antara berbagai entitas politik dan bagaimana hubungan ini memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan. Tautan politik adalah hubungan yang menggabungkan berbagai aspek dalam konteks politik. Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan tautan politik:

1. Komunikasi pemerintah-masyarakat:

Political Linkage mencakup komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang penting untuk memastikan keputusan dan kebijaksanaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan:

Dalam konteks politik, *Political Linkage* juga mencakup perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan cara menjalankannya, yang mungkin melibatkan praktik politik informal seperti politik nepotisme.

3. Pemilihan partai:

Political Linkage juga mempengaruhi pemilihan partai yang akan mengatur kehidupan masyarakat.

4. Pembuatan kebijaksanaan umum:

Political Linkage juga mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk wawan politik informal yang berperan dalam pilkada.

5. Keprihatinan partai:

Political Linkage juga mempengaruhi kehadiran partai dalam sistem politik, yang mencakup berbagai aktor seperti pebisnis, partai politik, birokrat partisan, LSM, dan media partisan.

Dari ketentuan di atas, tautan politik adalah hubungan yang menggabungkan berbagai aspek penting dalam konteks politik, mulai dari komunikasi pemerintah-masyarakat, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, pemilihan partai, ilmu politik, pembuatan kebijaksanaan umum, kehadiran partai, hingga keprihatinan partai.

1.6.4 Politik Informal Untuk Penguatan *Political Linkage*

Menurut Roniger (1994), sistem hubungan informal seperti klientelisme tidak menghilang begitu saja dalam proses pembangunan politik, melainkan mengalami dinamika baru dan jika perlu bentuk-bentuk kristalisasi baru dalam konteks perubahan sosio politik. *Political linkage* dapat terkait dengan hubungan informal politics, yang mencakup praktik-praktik politik yang tidak resmi dan seringkali tidak terlihat. Beberapa sumber yang ditemukan membahas hubungan antara tautan politik dan

informal politics, seperti hubungan antara partai politik dan masyarakat sipil, parlemen, dan lembaga politik lainnya. Politik Informal merupakan serangkaian proses, hubungan dan aktivitas yang terjadi diluar struktur resmi atau aturan politik formal, yang mencakup interaksi individu, kelompok dan jaringan yang memengaruhi pengambilan keputusan dan penguatan political linkage. Sedangkan, *Political linkage* merupakan jaringan serta koneksi antara pemimpin politik, partai politik dan kelompok masyarakat.

Hal ini akan menciptakan jalur komunikasi dan pengaruh yang memengaruhi dinamika politik formal. Dinamika Interaksi, politik informal yang memberikan ruang bagi interaksi yang lebih personal antaraktor politik, yang memfasilitasi pembentukan political linkage yang lebih kuat dan berkelanjutan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan, Politik informal dalam memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan politik melalui aliansi, pertukaran dukungan dan hubungan pribadi yang semuanya memperkuat *political linkage*. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik Informal dan *Political Linkage*: Ketahanan Politik, Politik Informal yang kuat dapat meningkatkan ketahanan politik melalui dukungan dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, legitimasi dan Keputusan Masyarakat, *Political Linkage* yang dibentuk melalui politik informal dapat memberikan legitimasi kepada pemimpin dan partai politik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Tantangan dan resiko dari adanya politik informal untuk penguatan *political linkage* Nepotisme dan Korupsi, politik informal yang tidak diatur dengan baik dapat mengarah pada nepotisme dan korupsi, mengancam integritas *political linkage*, eksklusivitas, yakni politik informal

yan sangat eksklusif dan dapat merugikan inklusivitas dan representatif dalam *political linkage*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif etnografis untuk menjelaskan dan menganalisis “Politik Legislator Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang”. Penelitian kualitatif etnografi berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Penelitian etnografi berfokus pada suatu masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data tetapi juga mencari keterkaitan antara variabel yang ada dan kemudian di diskripsikan. Penelitian ini ditujukan untuk meriset tugas, kewajiban, dan wewenang legislator dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural dan tautan politik secara detail.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor DPRD Kota Semarang dengan mengikuti daerah pilih masing-masing anggota dewan. Pemilihan lokasi penelitian guna mempermudah pengambilan data demi terpenuhinya tujuan penelitian ini. Lokasi persis penelitian ini berada di Kantor DPRD Kota Semarang di Jalan Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132.

1.7.3 Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang penting karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian dan dapat memberikan wawasan atau pandangan yang berharga untuk peneliti. Hal itu guna untuk mengkonfirmasi Politik Legislatif Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang

1.7.4. Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang terkait. Data-data yang diambil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer.

1.7.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi lapangan dengan anggota legislator DPRD Kota Semarang serta Masyarakat yang memilih anggota legislator tersebut.

1.7.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari studi Pustaka, laman website, jejak rekaman maupun arsip yang bersagkutan dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan Langkah yang paling mendasar dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini dipilih beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi/data demi memenuhi kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data tyang dipilih yaitu;

1.7.5.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden atau narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam yang kemudian digunakan sebagai data penelitian. Data yang didapat dari hasil mewawancarai pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada Anggota Dewan secara tatap muka. Melalui wawancara ini juga, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas dan proses kerja maupun proses di luar tugas resmi anggota legislator.

1.7.5.2 Observasi

Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2016;310) menyatakan bahwa, *“through observation, the researcher learn behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi akan dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan para anggota legislator di luar tugas resmi mereka, guna memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai peran dan interaksi mereka dengan masyarakat dalam konteks non formal. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data tambahan terkait Politik Legislatif Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang.

1.7.5.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah sebuah teknik pengambilan data secara sekunder dengan menganalisis data dari sumber-sumber yang telah ada guna menjadi data tambahan untuk penelitian ini. Menurut Creswell dan Creswell (2017), studi pustaka adalah "pemahaman kritis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang, sehingga peneliti dapat memahami, membandingkan, mengontraskan, dan mengevaluasi penelitian tersebut."

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009: 244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui empat alur, yakni:

1.7.6.1 Reduksi Data

Sugiyono (2017: 135) menyatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada penelitian ini dibutuhkan teknik analisis reduksi data guna untuk meminimalisir data sehingga penggambaran hasil penelitian dapat dijelaskan dan

dimengerti dengan mudah. Reduksi data membantu peneliti untuk melakukan penelitian ketika terjadi kelebihan data, agar penelitian menjadi terbatas dan data yang diperoleh terfokus pada topik penelitian.

1.7.6.2 Triangulasi Data

Triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti menggunakan triangulasi data maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan cara pengumpulan data dan berbagai sumber data.

1.7.6.3 Penyajian Data

Merupakan suatu susunan berita untuk memungkinkan kesimpulan dalam peneliti dapat dilakukan secara sempurna. Di dalam penelitian kualitatif, sajian data melibatkan cara- cara untuk menyajikan, mengorganisir, dan mengkomunikasikan hasil analisis yang diperoleh dari data kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

1.7.6.4 Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan diawal pengumpulan data, peneliti telah mencoba mengerti apa arti dari berbagai macam hal yang dapat ditemui dengan memulai melakukan sebuah catatan pola pernyataan, konfigurasi, alur sebab dan akibat. Hal itu diperiksa jika sesuai dengan temuan-temuan setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya yang pada akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan.